

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik, Penyidikan, Tugas dan Wewenang**

##### **1. Pengertian Penyidik**

Pasal 1 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>7</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 110

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditekankan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur

dengan peraturan pemerintah.<sup>8</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:<sup>9</sup>

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>10</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)

---

<sup>8</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani. 2010. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, hal 19

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hal 111-112

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 113

KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **2. Pengertian Penyidikan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (13) memuat pemahaman tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>11</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>12</sup>

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 99-100

<sup>12</sup> Harun, M. Husein. 2007. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 56

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>13</sup>

Penyidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi<sup>14</sup>

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hal 380-381

<sup>14</sup> Harun, M. Husein. *Op.Cit*, hal 57

berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

### **3. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Pasal 1 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid: police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 79

Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai pasal 7 ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab.

Sedangkan kewajiban penyidik polisi yang sebagaimana ditetapkan pada pasal 8 KUHAP antara lain yaitu :

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakan penyidikan tersebut.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu penyidik hanya menyerahkan kasus perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai penyidik tindak pidana berwenang untuk:



- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk tugas dan wewenang penyidik pembantu sendiri pengaturannya berbeda dari penyidik polisi. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 11 KUHAP dijelaskan bahwa wewenangnya adalah seperti dengan wewenang penyidik dalam pasal 7 KUHAP di atas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, sedangkan untuk tugasnya berdasarkan Pasal 12 KUHAP penyidik pembantu mempunyai tugas yaitu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penulis berpendapat bahwa penyidik mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk; pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum; pelaksana jika penyidikan dihentikan; pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan,

penyitaan, pemeriksaan surat; pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan; dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan; pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan; pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana; menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

#### **4. Tindakan Penyidik dalam Melaksanakan Proses Penyidikan**

##### **a. Penangkapan**

Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan terhadap tersangka anak sendiri dalam Undang-Undang pengadilan anak tidak diatur lebih lanjut, sehingga tindakan penangkapan terhadap tersangka anak di bawah umur berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan pada umumnya (*Lex generalis derogat lex specialis*).

##### **b. Penahanan**

Pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>16</sup>

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

#### c. Pengeledahan

Pasal 1 butir 17 KUHAP pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pengeledahan badan menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Pengeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk dilakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan untuk penangkapan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*, hal hal 127

<sup>17</sup> Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 350

Pengeledahan dalam pembahasan ini adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan rumah maupun pemeriksaan pakaian dan penyitaan barang yang berkaitan dengan barang bukti untuk disita.<sup>18</sup>

Penulis berpendapat bahwa pengeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka atau dibawa serta untuk di sita, karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan pengeledahan maka kemungkinan tersangka akan menghilangkan dan merusak barang bukti. Jadi, tujuan pengeledahan terhadap tersangka bermaksud untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.

#### d. Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan dalam pelaksanaannya dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hal 229

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 145

Penulis berpendapat bahwa penyitaan adalah tindakan dalam penyidikan dengan maksud untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya atas benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Anak dan Kewenangan Penyidik Anak**

### **1. Penyidikan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Ketentuan seputar hukum acara bagi pengadilan anak bersifat *lex specialis*, demikian pula dengan penyidikannya yang dilakukan oleh penyidik anak, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian RI atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian RI seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 26 ayat 3. Adapun syarat-syarat sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;  
dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik adalah harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika pelaku anak belum mencapai usia 12 tahun dan penyidik menyatakan bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka polisi hendaknya mengembalikan anak tersebut ke Departemen Sosial agar ditampung untuk sementara dipanti sosial anak untuk seterusnya diputus oleh pengadilan mengenai status terlantarnya yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI). Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Hal ini berarti juga bahwa tidak semua penyidik dapat menjadi penyidik dalam perkara anak, karena hanya yang mendapatkan kewenangan dari Kapolri untuk menjadi penyidik anak. Terdapat pengecualian ketentuan tersebut yakni terhadap hal-hal tertentu apabila penyidik anak tidak ada, maka penyidik dalam perkara biasa dapat menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “dalam

suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik . Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka.

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Sekali lagi ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana. Disisi lain penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Dalam proses penyidikan perkara yang tersangkanya adalah anak, juga terdapat penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Begitulah setidaknya pengertian yang di cantumkan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berlaku terhadap anak nakal pula, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP.

Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu harus penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik. Penangkapan itu dilakukan paling lama satu hari (1x24 jam) oleh POLRI.

Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu (RUTAN) oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Penahanan tersebut dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Penahanan ini dapat dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun keatas. Pelaksanaan penahanan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dengan surat perintah dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Disamping itu lama penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu selama 20 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama paling lama 10 hari. Dalam waktu 30 hari sejak penahanan maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara penyidikan



kepada penuntut umum dan jika dalam jangka waktu itu penyidik belum menyerahkan berkas perkara tersebut maka tersangka anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Sekali lagi hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Dalam hal tertentu guna kepentingan pemeriksaan Pasal 50 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak memberikan pengecualian terhadap Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perpanjangan waktu penahanan selama 15 hari dan dalam hal penahanan masih diperlukan maka dapat diperpanjang lagi selama 15 hari. Penahanan ini harus dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Perpanjangan istimewa tersebut harus melalui ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal penahanan oleh penyidik. Akan tetapi tersangka dapat mengajukan keberatan terhadap perpanjangan istimewa tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal tingkat penyidikan dan penuntutan. Namun apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak penahanan istimewa tersebut dilakukan pemeriksaan belum selesai maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Lama penahanan dalam

penyidikan ini jika dijumlah maka mencapai 60 hari dalam hal semua penahanan, penahanan istimewa beserta perpanjangannya maka penahanan dalam proses penyidikan ini paling lama adalah 60 hari.

## 2. Kewenangan Penyidik Anak

Penyidik anak dan penyidik dalam perkara biasa memiliki perbedaan, sehingga kewenangannya pun terdapat beberapa perbedaan. Ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dijalankan oleh Penyidik Anak selain dari kewajiban yang diatur dalam KUHAP sebagaimana dijelaskan diatas, khususnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, pengertian dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.
- b. Kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- c. Wajib merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara anak nakal.<sup>20</sup>

Seiring dengan adanya kewajiban, melekat pula kewenangan dari Penyidik Anak. Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap anak nakal, Penyidik Anak mempunyai kewenangan, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Melakukan penangkapan anak nakal, guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- b. Melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk paling lama 20 hari.

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 110

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 111

Dalam Penyidikan perkara anak, Penyidik mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Pemberitaan harus menggunakan singkatan nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh,
- b. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan,
- c. Proses penyidikan wajib dirahasiakan,
- d. Sejak ditangkap/ditahan berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan,
- e. Baik tersangka maupun orang tua, wali, orang tua asuh wajib diberitahu oleh pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan, hak memperoleh bantuan hukum,
- f. Saat dalam penangkapan/penahanan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

#### **1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan". Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan unit pelaksana teknis

pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.<sup>22</sup>

Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap:<sup>23</sup>

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

## **2. Dasar Hukum BAPAS Menurut UU No. 11 Tahun 2012**

Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dalam hal ini dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan yang

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>23</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

merupakan bagian dari Balai Pemasyarakatan, dimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 diatur mengenai yang termasuk Petugas Kemasyarakatan (Pasal 63), syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 64), tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 65).

BAPAS pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- f. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01.PK.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.
- g. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Nomor E.40.PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- h. PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi BAPAS Menurut UU No. 11 Tahun 2012**

- a. Tugas Pokok

Pembimbing kemasyarakatan bertugas:<sup>24</sup>

- 1) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- 2) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

---

<sup>24</sup> Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 3) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- 4) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; (Pasal ini sudah diamandemen menjadi, “Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama- sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus); menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak; menentukan program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- 2) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
- 3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;

- 4) Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

b. Fungsi

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- 1) Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum atau tindak pidana;
- 2) Menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif atau baik;
- 3) Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan arti klien tersebut.

#### **4. Peran BAPAS pada Perlindungan Anak**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi:

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dengan peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Bab IV Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).
- b. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.



Pasal 55, 57 dan 58 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak. Pasal 56 diatur kewajiban Hakim untuk memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum sidang dibuka. Pasal 59 (2) mewajibkan kepada hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus dimulai semenjak proses penyidikan. Pasal 42 (2) penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran pembimbingan kemasyarakatan.

## **5. BAPAS Dalam Perspektif Peradilan Pidana Anak**

Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan harapan yang sangat besar bagi Kementerian Hukum dan HAM (c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk segera memperkuat eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Bapas, melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tidak hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Tetapi, melalui UU SPPA ini.

UU SPPA ini mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi "wajib", dijalankan oleh Bapas. Peran yang dijalankan Bapas tersebut bergerak sejak tahap

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Namun demikian, semangat yang terkandung dalam UU SPPA ini adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (*Restoratif Justice*) dan menghindarkan anak dari proses peradilan (*Diversi*). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *Diversi*.

Namun perlu juga dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan *Diversi*. *Diversi* ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan jika perkara anak harus masuk dalam proses peradilan, maka Bapas (dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan) atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 23). Secara lebih rinci, merujuk pada UU SPPA, dapat dikemukakan peran Bapas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

a. Proses *Diversi*

Dalam proses *Diversi*, Bapas mempunyai peran strategis, yaitu:

- 1) Petugas PK Bapas harus terlibat dalam proses *diversi* yang dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan. Keterlibatan petugas PK Bapas ini adalah dengan memberikan pertimbangan kepada penyidik, penuntut

umum, dan hakim selama proses diversi tersebut. Pertimbangan ini di muat dalam hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh petugas PK Bapas. (Pasal 8 dan 9 UU SPPA)

- 2) Memberikan rekomendasi tentang bentuk kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, harus didasarkan pada rekomendasi petugas PK Bapas. Bentuk kesepakatan Diversi dapat berupa :
  - a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b) Rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. (Pasal 10 UU SPPA)
- 3) Setelah kesepakatan Diversi di setuju dan dilaksanakan, petugas PK Bapas wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari. (Pasal 14 UU SPPA)

4) Petugas PK Bapas juga terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses diversi dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun. Keputusan yang diambil adalah dalam bentuk: menyerahkannya kembali kepada orangtua / Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Terhadap keputusan tersebut di atas, Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) Anak di nilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 UU SPPA) Itulah peran yang di emban oleh Bapas sejak awal proses Diversi hingga pelaksanaan keputusan Diversi.

b. Tahap Penyidikan

Dalam tahap penyidikan, peran petugas PK Bapas adalah memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik setelah tindak pidana di laporkan atau diadukan. Dalam hal ini, permintaan pertimbangan atau saran kepada petugas PK Bapas merupakan kewajiban bagi penyidik. (Pasal 27 UU SPPA) Makna yang terkandung dalam pasal ini adalah apabila penyidik tidak meminta pertimbangan atau saran

kepada PK Bapas terkait penanganan anak maka dapat di katakan proses penyidikan tersebut batal demi hukum (tidak sah).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 UU SPPA, Bapas mempunyai kewajiban untuk menyerahkan penelitian kemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik di terima.

c. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Tahap pemeriksaan pengadilan, peran strategis Bapas adalah:

- 1) Memberikan pendampingan terhadap anak dalam sidang pengadilan.(Pasal 55 UU SPPA)
- 2) Membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan setelah surat dakwaan di bacakan.(Pasal 57 UU SPPA)
- 3) Hadir pada saat pemeriksaan Anak Korban dan / atau Anak Saksi. (Pasal 58 ayat (2) UU SPPA)
- 4) Melakukan pendampingan terhadap Anak Korban dan / atau Anak Saksi yang dilakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.(Pasal 58 ayat (3) UU SPPA).

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang di sampaikan oleh PK Bapas wajib menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak, dan apabila laporan penelitian kemasyarakatan ini tidak di pertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum. Pengadilan mempunyai kewajiban memberikan petikan putusan pada hari putusan di ucapkan, selain kepada

Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Penuntut Umum, juga memberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan salinan putusan wajib diberikan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Mencermati peran Bapas yang begitu besar dalam penanganan dalam perkara anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA, maka memperkuat Bapas merupakan satu hal yang wajib segera dilakukan. Sudah semestinya, Bapas dipenuhi dengan petugas PK yang mempunyai kompetensi yang memadai sehingga mampu menyajikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang layak bagi aparat hukum lain (Polisi, Jaksa, atau Hakim) dalam menentukan keputusan terhadap anak; mampu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

Pada tataran lebih jauh, kebutuhan tentang petugas PK yang memiliki kompetensi yang memadai ini juga mempunyai peran penting dalam ikut menentukan program perawatan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya dan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak**

Mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan cukup adalah bukti yang berupa keterangan-keterangan dan data, yaitu:<sup>25</sup>

1. Laporan Polisi.
2. B.A.P di Tempat Kejadian Perkara.
3. Keterangan saksi termasuk saksi ahli (*visum et Repertum*).
4. Barang bukti.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah 7 (tujuh) hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat di perpanjang selama 8 (delapan) hari, jadi totalnya adalah 15 (lima belas) hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama di tahan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat di perpanjang paling lama 40 (empat) hari jadi totalnya adalah 60 (enam puluh) hari. Disamping itu,

---

<sup>25</sup> Sonaryo. 1982. *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, hal 78

penanganan oleh petugas Polri atau penyidik terhadap anak-anak tidak sama dengan penyidik untuk orang dewasa, hal ini diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Penahanan tahap pertama terhadap anak yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 15 (dua puluh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 5 (lima) hari. Dalam waktu 15 (lima belas) hari, Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Jika anak-anak diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari tapi jika orang dewasa dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh)



hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Pasal 27 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (1) dan (3) menetapkan bahwa:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Selanjutnya, di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa:

## Pasal 18

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

## Pasal 19

- a) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
- b) Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

## E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:<sup>26</sup>

“Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hal

martabatnya sebagai manusia.<sup>27</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Perlindungan hukum merupakan tempat berlindung. UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>29</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 menyatakan bahwa:<sup>30</sup>

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.”

<sup>27</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal 3

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal 20

<sup>29</sup> UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

## **2. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan Hukum**

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Hak anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada:

### **a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang

tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP:<sup>31</sup>

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- 2) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa.
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP.
- 6) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- 7) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- 8) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 9) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

---

<sup>31</sup> Pasal 50 ayat (1) sampai pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- 10) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak kelurahan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.
- 11) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
- 12) Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- 13) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- 14) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>32</sup>

Hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut adalah:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>33</sup>
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Suria Ningsih. 2013. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: USU Press, hal 106

<sup>33</sup> Pasal 16 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>34</sup> Pasal 18 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>35</sup>

4) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>36</sup>

c. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Adapun hak-hak anak dalam UU No.11 Tahun 2012 sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional

<sup>35</sup> Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>36</sup> Pasal 64 Ayat (2) huruf (g) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>37</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Anak, dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti.<sup>38</sup>

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hal 19



*delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>39</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>40</sup>

Moeljatno menjelaskan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>41</sup>

Simons menerangkan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*), yang berhubungan dengan kesalahan (*schuld*) dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.<sup>42</sup>

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 16

<sup>41</sup> Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 59

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

Pompe merumuskan secara teori tentang tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>44</sup>

Adami Chazawi menjelaskan bahwa istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.<sup>45</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan berbagai pandangan beberapa ahli hukum tentang tindak pidana, maka pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka

<sup>44</sup> Bambang Poernomo. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 91

<sup>45</sup> Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 71

terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Penulis menyimpulkan bahwa Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Simons menjelaskan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>46</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

---

<sup>46</sup> Mulyati Pewennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal 10

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>47</sup>

- a. Unsur obyektif:
  - 1) Perbuatan orang
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.
- b. Unsur Subjektif:
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
  - 2) Adanya kesalahan.
  - 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah:<sup>48</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:<sup>49</sup>

- a. Sudut Teoritis  
Unsur tindak pidana adalah:
  - 1) Perbuatan;
  - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Sudut Undang-Undang
  - 1) Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;
  - 2) Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;
  - 3) Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;
  - 4) Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal 11

<sup>48</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hal 66

<sup>49</sup> Adami Chazawi. 2008. *Op.Cit*, hal 79-80

- unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
  - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
  - 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
  - 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;
  - 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh: “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
  - 10) Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
  11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subyektif dan obyektif dalam suatu tindak pidana, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
  - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
  - 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal 194

- 4) Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
  - 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - 2) Kualitas dari si pelaku;
  - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur *subjektif* maupun unsur-unsur *obyektif*, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>51</sup>

Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dibedakan antara Pelaku (*pleger*) dan Pembuat (*dader*). Pelaku (*pleger*) adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana.<sup>52</sup> Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai Pembuat (*daders*) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief. 2006. Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hal 37

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*) yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Dengan demikian Pelaku Tindak Pidana yaitu barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang.

## 2. Tindak Pidana Anak

Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain: Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, *Delikuen*si Anak dan Tuna sosial.

Istilah *delikuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan *delikuen*si. Kata *delikuen*si atau *deliquency* dijumpai bergandengan dengan kata *junevile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:<sup>53</sup>

- a. *Junevile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.
- b. *Junevile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak / *junevile court*.

Paulus Hadisuprpto yang menyebutkan bahwa yang dimaksud *Juvenile Delinquency* adalah “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Simanjuntak. 1995. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT Alumni, hal 60

<sup>54</sup> Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hal 11



Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 (tiga) pengertian, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan Anak sebagai tindak pidana (*juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Dalam UU No.3 Tahun 1997, Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak Nakal” sedangkan pada UU No.11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”. Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan

---

<sup>55</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: PT Alumni, hal 150

tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. istilah “anak nakal” merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Selanjutnya, penggunaan istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, dimana istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dengan demikian Tindak Pidana Anak ialah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam Masyarakat maupun Negara yang dilakukan pada usia yang belum dewasa.

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Terkait dengan tindak pidana Moeljatno memberikan definisi dimana *Strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

---

<sup>56</sup> UU No.11 Tahun 2012 butir 3,4,5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.<sup>57</sup>

Pemikiran Moeljatno tersebut memiliki inti yang serupa dengan pendapat Van Hamel yang dimana *Straafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan di dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>58</sup>

Dilihat dari pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari tindak pidana menurut Moeljatno yaitu:<sup>59</sup>

- a. perbuatan  
dalam hal perbuatan ini, hanya perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya.
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian dari diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana

Kekerasan seksual termasuk sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, baik unsur formil maupun unsur materiil. Kekerasan seksual dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan karena merampas hak asasi seseorang dan menimbulkan trauma kepada korbannya, selain itu kekerasan seksual dilarang oleh hukum sebagaimana diatur di dalam (KUHP).

<sup>57</sup> Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hal

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Adami Chazawi. 2008. *Op.Cit.*, hal.79

Dalam KUHP tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV dengan judul Kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dalam Pasal 285 yang menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari pasal tersebut untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual antara lain:

- a. Bahwa korban kekerasan seksual merupakan seorang wanita
- b. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar perkawinan.
- c. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak adanya persetujuan dari pihak korban mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Nursyahbani Kantjungkana berpendapat bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang menjadi contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.<sup>60</sup> Sedangkan menurut Steven Box pengertian kekerasan seksual adalah *rape constitute a particular act of sexual access, namely the penis penetratting the vagina without consent of the female concerned.*<sup>61</sup> yang artinya perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan.

---

<sup>60</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, hal 65

<sup>61</sup> *Ibid.*

Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah seseorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.<sup>62</sup> Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>63</sup>

a. Kekerasan Seksual

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan “*latus*” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan.<sup>64</sup> Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian di atas dikatakan bahwa kekerasan seksual adalah kontak seksual yang dikehendaki oleh salah satu pihak inti dari

---

<sup>62</sup> Wirdjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal 117

<sup>63</sup> Suparman Marzuki. 2000. *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 25

<sup>64</sup> Marsana Windhu. 2001. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Bandung: Kanisius, hal 62

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal 62

kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan), sedangkan secara umum dapat diartikan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang merasa terintimidasi secara seksual, merasa terendahkan dan terambil kehormatan dan harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak.

#### b. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Jenis-jenis kekerasan seksual menurut Mulyana W. Kusuma, menyebutkan sebagai berikut.<sup>66</sup>

- 1) *Sadistic Rape*;  
Artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku kekerasan seksual telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- 2) *Angea Rape*;  
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Dononation Rape*;  
Yakni suatu kekerasan seksual yang terjadi karena pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- 4) *Seductive Rape*;  
Suatu kekerasan seksual yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

<sup>66</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, hal 47

5) *Victim Precipitated Rape*;

Yakni kekerasan seksual yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6) *Exploitation Rape*;

Kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Karakteristik umum dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
- 2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- 3) Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
- 4) Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yaitu: anger rape, power rape, dan sadistic rape. Dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis;
- 5) Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
- 6) Korban perkosaan adalah partisipatif.
- 7) Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan

c. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dan perempuan bermacam-macam bentuknya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi yaitu:<sup>68</sup>

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal 48

<sup>68</sup> Ismatoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal 89

- 1) Fisik yaitu berupa kekerasan melalui memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat (senjata), bahkan sampai dengan membunuh.
- 2) Psikologis yaitu berupa kekerasan dengan berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakantindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dan lain-lain)
- 3) Seksual yaitu tindakan yang mengarah ajakan atau pemaksaan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Selain persentuhan antar bagian tubuh, kontak seksual juga mencakup kegiatan yang tidak bersentuhan, misalnya percakapan atau pertukaran gambar yang berbau seks. Kedua jenis kontak ini bisa mengganggu kondisi fisik dan kondisi psikis. Bentuk-bentuk pelecehan/kekerasan seksual, yaitu:
  - a) Kekerasan seksual yang berupa sentuhan  
Pelaku memegang-megang, meraba atau mengelus organ vital anak seperti alat kelamin (vagina, penis), bagian pantat, dada/payudara. Pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuhnya sendiri, bagian tubuh pelaku, atau bagian tubuh anak lain.
  - b) Kekerasan seksual yang tidak berupa sentuhan  
Pelaku mempertunjukkan bagian tubuhnya (termasuk alat kelamin) pada anak/remaja secara cabul, tidak pantas, atau tidak senonoh, mengambil gambar (memfoto) atau merekam anak/remaja dalam aktivitas yang tidak senonoh, dalam adegan seksual yang jelas nyata, maupun adegan secara tersamar memancing pemikiran seksual. Contohnya pelaku merekam anak yang sedang membuka bajunya, memperdengarkan atau memperlihatkan visualisasi (gambar, foto, video, dan semacamnya) yang mengandung muatan seks dan pronografi. Misalnya, pelaku mengajak anak menonton film dewasa (film porno).



Komnas Perempuan menyatakan ditemukan ada 14 bentuk yang merupakan kekerasan seksual, diantaranya:<sup>69</sup>

- 1) Perkosaan;
- 2) Pelecehan seksual (verbal, gerak tubuh, pandangan mata);
- 3) Eksploitasi seksual ;
- 4) Penyiksaan seksual;
- 5) Perbudakan seksual;
- 6) Intimidasi bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 7) Prostitusi paksa;
- 8) Pemaksaan kehamilan;
- 9) Pemaksaan aborsi;
- 10) Pemaksaan perkawinan;
- 11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 12) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi gender

Dalam KUHP pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

---

<sup>69</sup> Sita Aripurnami. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Bandung: PT Alumni, hal 53

Tindak pidana kekerasan seksual diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau engan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Yang dimaksud dalam pasal 76E Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

## **G. Tinjauan Umum Tentang Anak, Hak Anak dalam SPPA, Anak dalam Aspek Hukum**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).<sup>70</sup>

Pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

#### **a. KUHPidana**

Pasal 45 KUHPidana, yaitu “anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.”

#### **b. Hukum Perdata**

Pasal 330 KUHPerdata, yaitu “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.”

#### **c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pasal I ayat (1), yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

---

<sup>70</sup> Shanty Dellyana. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal 50

- d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 ayat (5), yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (4), yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 ayat (1), yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2), yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

- h. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (5), yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

- i. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan betas)

tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan pengertian anak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dimana anak dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. Memperoleh asimilasi
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Anak dalam Aspek Hukum

Meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut, yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Andi Lesmana. 2012. *Definisi Anak*, Sumber : <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak> diunduh tanggal 30 Mei 2013, pada pukul. 1.35 WIB

a. Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian anak dalam aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan:

a. Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah<sup>72</sup>.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: **pertama**, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat **kedua** si anak belum pernah kawin,

---

<sup>72</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

UU No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>73</sup>

b. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”<sup>74</sup>

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

<sup>73</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>74</sup> Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, hal 4



c. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Darwan Prints. 1989. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Jakarta: Djambatan, hal 3

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- 2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak
- 3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri
- 4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
- 5) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.